

KONTESTASI SASTRA BACAAN LIAR DENGAN TERBITAN BALAI PUSTAKA DI HINDIA BELANDA 1917-1942

Sulistya Putri ^{a,*}, Dewi Yulianti ^b, Dhanang Respati Puguh ^c, Ilham Nur Utomo ^d

^a MAN 1 Jepara

Bawu IV, Bawu, Kec. Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59461

^{b,c,d} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Gedung B. It. 2 Fakultas Ilmu Budaya Jl. Prof. Soedarto, S.H. Kampus UNDIP Tembalang, Semarang 52075

Abstrak:

Budaya cetak di Hindia Belanda berkembang pesat seiring dengan program pendidikan pada masa Politik Etis yang menghasilkan masyarakat terdidik. Kebutuhan bahan bacaan masyarakat terdidik tidak hanya dipenuhi oleh penerbit milik pemerintah, namun juga penerbit di luar pemerintah. Perkembangan lembaga penerbitan memicu munculnya kontestasi antara sastra yang diterbitkan di luar pemerintah (bacaan liar) dengan terbitan pemerintah (Balai Pustaka). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi yang terjadi antara sastra bacaan liar dengan terbitan Balai Pustaka. Metode sejarah kritis dan pendekatan ideologi, politik, serta ekonomi digunakan dalam kajian ini. Kontestasi yang muncul dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yakni, ideologi, politik, dan ekonomi. Narasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Pustaka banyak terpengaruh oleh ideologi kapitalis, sedangkan bacaan liar dipengaruhi oleh ideologi sosialis dan komunis, dan hal tersebut memicu adanya pertentangan. Sementara itu, pada aspek politik Balai Pustaka lebih berfungsi mempertahankan citra baik Pemerintah Kolonial Belanda, sedangkan bacaan liar memiliki narasi berupa kritik atau pun gagasan untuk memperoleh kemerdekaan. Pada aspek ekonomi, Balai Pustaka sebagai penerbitan pemerintah mendapat subsidi, sehingga memicu banyaknya bacaan murah yang beredar di masyarakat.

Kata-Kata Kunci: *Kontestasi Sastra; Bacaan Liar; Balai Pustaka; Politik Kolonial.*

Abstract:

Print culture in the Dutch East Indies developed rapidly along with educational programs during the Ethical Politics period which produced an educated society. The reading needs of the educated public are not only met by government-owned publishers, but also by publishers outside the government. The development of publishing institutions triggered the emergence of contestation between literature published outside the government (illegal readings) and government publications (Balai Pustaka). This study aims to analyze the contestation that occurs between wild reading literature and publications published by Balai Pustaka. Critical historical methods and ideological, political, and economic approaches are used in this study. Contestations that arise can be grouped into three aspects namely, ideology, politics, and economics. The narratives and policies issued by Balai Pustaka are heavily influenced by capitalist ideology, while wild literature is influenced by socialist and communist ideologies, and this has sparked conflict. Meanwhile, on the political aspect, Balai Pustaka was more functioning to maintain the good image of the Dutch Colonial Government, while wild readings had narratives in the form of criticism or ideas for gaining independence. On the economic aspect, Balai Pustaka as a government publication receives subsidies, thus triggering a large number of inexpensive reading materials circulating in the community.

Key Words: *Literary Contest; Wild Reading; Library Hall; Colonial Politics.*

PENDAHULUAN

Dalam artikel ini dibahas tentang kontestasi bacaan liar dengan terbitan Balai Pustaka di Hindia Belanda. Kontestasi muncul atas respons terhadap perkembangan budaya cetak dan pertambahan jumlah kaum terdidik yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Mesin cetak pertama kali muncul pada 1668, sedangkan surat kabar di Hindia Belanda baru muncul satu atau dua abad setelahnya yakni Batavia Nouvelles (F. Habib, 2017). Setelah itu, banyak muncul penerbitan di Hindia Belanda seperti Landsdrukkerij, percetakan milik misionaris, percetakan milik swasta Indo-Eropa, dan percetakan milik Bumiputera. Namun demikian, pada kenyataannya hasil dari budaya cetak tersebut belum sepenuhnya menjangkau setiap lini masyarakat Bumiputera karena banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Setelah masuk pada abad ke-20, terutama setelah pelaksanaan program Politik Etis, banyak muncul penerbitan milik Bumiputera di Hindia Belanda seperti Bintang Hindia (1903-1907) dan Medan Prijaji (1907-1912) (F. Habib, 2017). Menurut Moriyama (2005, 113) perkembangan percetakan terjadi karena golongan intelektual Bumiputera semakin marak pada masa Politik Etis. Pada masa Politik Etis, penggunaan bahasa lebih bersifat terbuka. Bahasa Belanda sebagai akses informasi ilmu pengetahuan Barat juga mendapat arti 'etis', suatu pembayaran 'utang budi'. Bahasa Belanda tidak hanya dilihat

sebagai bahasa sumber, melainkan sebagai bahasa bantu yang memberi akses terhadap pengetahuan Barat sekaligus menjadi faktor penting dalam proses pendidikan menuju otonomi, (Groeneboer, 1999, 37). Seiring dengan meningkatnya pendapatan ekonomi kaum Bumiputera, banyak dari mereka yang mulai menyekolahkan anaknya. Di lain sisi, di Hindia Belanda juga telah banyak didirikan sekolah seperti Sekolah Belanda Bumiputera (Hollands-Inlandse School, HIS) pada 1907 dan Sekolah Belanda-Cina (Hollands-Chinese School HCS) pada 1908, dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian, akses terhadap ilmu pengetahuan semakin terbuka meski masih terbatas pada golongan tertentu.

Sekolah-sekolah milik Pemerintah Kolonial Belanda memiliki kuota terbatas untuk kaum Bumiputera. Beberapa orang yang memiliki akses ke sekolah tersebut hanya golongan tertentu seperti golongan priayi dan saudagar, sehingga akses terhadap Bahasa Belanda hanya terbatas untuk golongan tersebut. Selain sekolah milik pemerintah, juga terdapat beberapa sekolah partikelir yang memakai Bahasa Belanda, namun biaya pendidikan yang ditawarkan lebih tinggi dan pengajaran yang dilakukan memiliki misi untuk menjauhkan siswa dari agama Islam ("Onderwijs", 1917). Keterbatasan masyarakat dalam mengakses sekolah berbahasa Belanda menjadi salah satu faktor perkembangan bahasa alternatif yakni Bahasa Melayu. Perkembangan Bahasa Melayu juga didukung oleh beberapa

golongan, seperti golongan Islam. Hal tersebut karena golongan Islam banyak yang berasal dari Melayu dan menyebarkan pendidikan agama Islam dengan Bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai lingua franca karena menjadi bahasa mayoritas dan mudah diterima oleh masyarakat (Herniti, 2017).

Perkembangan budaya cetak, pendidikan, serta bahasa turut berpengaruh terhadap bahan bacaan yang sedang berkembang di Hindia Belanda. Bacaan-bacaan tersebut memuat ideologi sang pengarang dan digunakan sebagai media politik melawan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Bersamaan dengan berkembangnya budaya literasi maka muncul kontestasi dari dua golongan yakni bacaan liar dan terbitan Balai Pustaka, yang membawa misi serta kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas tentang kontestasi antara bacaan liar dengan terbitan Balai Pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh kaum Bumiputera melalui bacaan liar serta upaya pemerintah untuk menghalau narasi dan perkembangan bacaan liar melalui terbitan Balai Pustaka.

Kajian tentang bacaan liar dan Balai Pustaka telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Teeuw (1972), Faruk (2002), Sulton (2015), Sulaiman (2017). Teeuw (1972) menyebutkan bahwa Balai Pustaka memiliki peran penting dalam kemunculan sastra modern di Indonesia. Faruk (2002) menulis tentang novel-novel tradisi Balai Pustaka yang disusun secara

komprehensif dengan menggunakan teori dan metode strukturalisme genetis serta menggunakan teori-teori yang membantu meliputi semiotik, formalis, dan dekonstruktif. Karya ini juga membahas mengenai hubungan pengarang dengan sosial kebudayaan masyarakat. Faruk berpendapat bahwa novel-novel tradisi Balai Pustaka 1920-1942 mengikuti kaya romantisisme Barat, sehingga lebih ditonjolkan mengenai dunia-dunia ideal. Tradisi tersebut tidak terlepas dari keinginan para pengarang untuk mendapatkan posisi sejajar dengan kaum kolonial Belanda. Selanjutnya karya-karya bacaan liar juga pernah dibahas oleh Sulton (2015), mengkaji tentang kemunculan bacaan liar yang dikaitkan dengan nasionalisme khususnya upaya menuju kemerdekaan. Sulaiman (2017) membahas tentang telaah terhadap naskah-naskah bacaan liar yang dikaitkan dengan kajian sosiologi sastra. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap rasa sosial, fakta sosial, dan barometer sosial dalam karya sastra. Berdasarkan kajian yang telah ada disebut kajian tentang kontestasi antara bacaan liar dan terbitan Balai Pustaka belum banyak diulas secara spesifik.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kontestasi antara sastra bacaan liar dengan terbitan Balai Pustaka maka perlu dipahami konsep kontestasi, bacaan liar, dan terbitan Balai Pustaka. Istilah kontestasi diartikan sama dengan istilah debat dalam KBBI. Vancil (1993) dalam Suparno (2010, 40) menjelaskan bahwa kontestasi memiliki berbagai perspektif yang berbeda; pertama apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa

saja yang ada dalam pikiran mereka; kedua, mencakup siapa yang pro dan siapa-siapa yang kontra (agents); ketiga, melakukan identifikasi terhadap kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif; keempat, mencermati tentang karakteristik dan sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan seperti apa yang ada dalam kontestasi tersebut. Kontestasi pada kajian ini lebih difokuskan pada pertarungan atas berbagai kepentingan antara pihak penerbit diluar pemerintah dan penerbit pemerintah, pada masa pemerintahan Kolonial Belanda.

Yulienta (2008) menjelaskan bahwa karakteristik sastra yang termasuk bacaan liar versi Balai Pustaka memiliki ciri-ciri yakni 1) memuat gagasan politik tertentu yang bertentangan dengan pandangan politik pemerintah yang berkuasa, 2) berisi tentang penghinaan atau memojokkan golongan bangsa tertentu, 3) memuat atau menceritakan tentang adegan-adegan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, 4) terdapat penghinaan terhadap bangsa tertentu dan 5) menggunakan bahasa Melayu Rendah. Bacaan liar tersebut berkembang atas kondisi yang dialami oleh masyarakat Bumiputera sebagai masyarakat terjajah, sehingga perlawanan juga dilakukan melalui media bacaan. Berbeda dengan bacaan liar, bacaan Balai Pustaka merupakan bacaan yang memiliki fungsi-fungsi politis untuk membendung keberadaan bacaan liar. Hal ini karena Balai Pustaka menjalankan fungsi sensor terhadap naskah-naskah yang diterbitkan (Putri, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan sumber digital maupun non digital berupa majalah, surat kabar, artikel dan buku. Sumber-sumber didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pusat Dokumentasi HB. Jassin, PT Balai Pustaka, dan platform digital. Sumber-sumber tersebut selanjutnya dikritik secara internal dan dianalisis serta diinterpretasi menggunakan pendekatan, ideologi, politik, dan ekonomi untuk menghasilkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut kemudian dirangkai menjadi karya historiografi sesuai dengan kaidah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sastra Liar (Bacaan Liar) dan Komisi Bacaan Rakyat (Balai Pustaka)

Untuk membahas kontestasi yang terjadi antara sastra bacaan liar dengan bacaan Balai Pustaka, maka perlu dipahami gambaran umum perkembangan bacaan liar dan Balai Pustaka. Bacaan liar berkembang pesat seiring dengan perkembangan pers dan pergerakan kaum Bumiputera. Bacaan liar berisi fenomena-fenomena dalam masyarakat, salah satunya adalah situasi politik pada saat karya itu diproduksi, sehingga bacaan berfungsi sebagai fasilitas komunikasi bagi propagandis dan agitator, termasuk membentuk sekumpulan organisatoris (Sulton, 2020, 214). Bacaan yang menentang Pemerintah Hindia Belanda muncul pada akhir abad ke-19, mayoritas ditulis oleh peranakan Tionghoa, kaum liberal dan

sosialis Belanda, serta kalangan Bumiputera. Karya sastra peranakan Tionghoa merupakan sastra yang ditulis oleh orang-orang Tionghoa yang berada di Hindia Belanda. Pada umumnya, golongan Tionghoa tidak lagi menguasai Bahasa Tionghoa dan menggunakan Bahasa Melayu, karena tidak lagi memiliki hubungan dengan negara asalnya. Sastra Tionghoa mayoritas berisi tentang kejadian aktual yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari narasi yang selalu ada di bawah judul, berbunyi “*Satoe tjerita jang soenggoeh-soenggoeh yang soedah terdjadi di...*” (Liji, 1987, 166).

Teeuw menggolongkan sastra peranakan Tionghoa sebagai bacaan liar yang berbentuk picisan atau murahan (Suwondo, 1997, 21). Penggolongan tersebut didasarkan pada bahasa lugas, serta cerita yang menampilkan tentang kepahlawanan. Cerita tersebut juga dinilai dapat memberikan contoh buruk terhadap kaum Bumiputera. Salah satu contoh sastra Peranakan Tionghoa adalah *Tjin Nio atawa Istri Djati di Medan Perang Tiongkok-Japan* yang diterbitkan pada tahun 1938. Naskah tersebut bercerita tentang kondisi perang Jepang dan Tiongkok (Liji, 1987, 169-170). Menurut Claudine Salmon dalam Nugroho (2007, 166) karya sastra yang dihasilkan oleh peranakan Tionghoa antara 1870-1966 di Indonesia sejumlah 3005 karya dengan 806 pengarang. Namun demikian, dalam perkembangannya muncul marjinalisasi sastra Tionghoa. Marjinalisasi sastra Tionghoa didukung dengan adanya penerbit Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan resmi pemerintah.

Selain sastra Tionghoa, sastra yang Sastra yang ditulis oleh kaum sosialis Belanda sebagian juga digolongkan dalam bacaan liar karena berisi tentang perlawanan kepada pihak pemerintah. Sebagai contoh adalah karya Douwes Dekker yang berjudul *Max Havelaar*. Karya tersebut berisi tentang kritik yang ditujukan kepada pemerintah kolonial terhadap kebijakan yang berlaku di Hindia Belanda. Multatuli merupakan nama samaran dari Eduard Douwes Dekker. Ia merupakan dewan pengawas keuangan Pemerintah Belanda yang pertama kali ditempatkan di daerah Batavia 1842 dan meminta untuk dipindahkan ke Sumatera Barat. Pada tahun yang sama, ia dipindahkan ke Sumatera Utara, untuk ditugaskan sebagai *controleur*. Setelah itu, ia ditempatkan di Lebak Banten. Pada saat bekerja sebagai tanggan panjang Pemerintah Kolonial Belanda, ia justru menolak perilaku Belanda yang tidak adil, merampas, dan bentuk-bentuk kekerasan lain. Ia juga menaruh perhatian terhadap kasus kelaparan, penderitaan, serta ketertindasan yang dialami oleh masyarakat Bumiputera di Hindia Belanda. Beberapa kritik kepada Pemerintah Belanda tersebut dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Max Havelaar* (Multatuli, 2015).

Menurut Razif (2005, 2), bacaan liar mulai membanjir pada 1920-1926. Bacaan yang dinilai berbahaya oleh Belanda antara lain berupa syair, cerpen, roman, dan novel. Membanjirnya bacaan liar ini muncul akibat terbukanya celah-celah yang relatif “demokratis” bagi pentas pergerakan. Misalnya pada kongres IV 1924 di Batavia, PKI mendirikan *Kommissi Batjaan Hoofdbestuur* PKI.

Komisi ini berhasil menerbitkan dan menyebarkan tulisan-tulisan serta terjemahan “literatur sosialisme” yang dipahami oleh orang-orang pergerakan sebagai bacaan yang berguna untuk menentang terbitan kaum modal. Selain itu, pada terbitan lain juga banyak muncul bacaan yang mengandung protes dan kritik terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Contoh bacaan tersebut adalah, syair *Sama Rata Sama Rasa* karya Mas Marco Kartodikromo (*Sinar Djawa*, 10 April 1918), syair *Bajak Laut* karya Mas Marco Kartodikromo (*Sinar Hindia*, 23 Desember 1918), *Hikajat Kadiroen karya Semaoen* (1920), *Semarang Hitam* karya Mas Marco Kartodikromo (1924), *Rasa Mardika* karya Soemantri (1924), dan lain sebagainya.

Challanan (2016, 11-12) menyebutkan bahwa umumnya cerita-cerita yang dikategorikan sebagai bacaan liar tersebut adalah tulisan-tulisan yang berisi kritik terhadap pemerintah. Salah satu yang aktif menulis sastra perlawanan adalah Marco Kartodikromo. Marco Kartodikromo merupakan murid dari Tirto Ahdhi Soerjo pemilik surat kabar *Medan Prijaji*. Marco Kartodikromo kemudian terkenal sebagai seorang jurnalis yang memiliki sifat revolusioner yang pernah berkerja di berbagai surat kabar seperti *Doenia Bergerak*, *Pantjaran Warta*, dan *Sinar Djawa*. Beberapa contoh karya yang dihasilkan adalah *Mata Gelap*, *Student Hidjo*, *Matahariah*, *Syair Rempah-Rempah*, *Rasa Merdika: Hikayat Soejanmo*, dan lainnya. Akibat dari karya-karya yang dihasilkan tersebut, ia mengalami beberapa kali delik pers dan pada akhirnya meninggal pada usia 43 tahun di Boven Digoel akibat

terserang penyakit malaria (Adam, 1997, 2-3).

Pemerintah semakin merasa resah atas perkembangan bacaan liar di Hindia Belanda. Oleh karena itu, dibentuk lembaga penerbitan untuk menjalankan kepentingan pemerintah yakni Balai Pustaka. Swantoro (2002, 61) menjelaskan bahwa kelahiran Balai Pustaka tidak dapat dilepaskan dari Komisi Bacaan Rakyat (*Volkslectuur*) yang didirikan pada 1908. Komisi tersebut berada di bawah komando *Adviseur voor Inlandsche Zaken* (Biro Penasihat Urusan Bumiputera) yang termasuk dalam *Departement van Onderwijs en Eeredienst* (Departemen Pengajaran dan Ibadah). Faruk (2002) juga menyebutkan bahwa pembentukan departemen tersebut memiliki kepentingan ideologi, yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan mempertahankan kolonialisme di daerah jajahan.

Pada awalnya komisi ini berfokus pada pengumpulan semua jenis dongeng dan sejenisnya, sehingga menghindari fanatisme yang berkaitan dengan politik, agama, dan ras. Selanjutnya, panitia memutuskan untuk fokus terhadap naskah-naskah Jawa. Meskipun standar penyeleksian yang ditetapkan oleh komisi tidak sesuai dengan standar yang diterapkan di Barat, gagasan dalam manuskrip yang terlihat berlebihan dan tidak bermoral akan ditinggalkan. Hal tersebut juga berlaku terhadap tulisan yang bersifat erotis (Jedamski 1997, 160). Penyeleksian naskah ini telah menunjukkan bahwa komisi memiliki fungsi politis dalam pemilihan naskah yang akan diterbitkan meski sebatas berwujud penyeleksian.

Selanjutnya pada tahun 1912 D.A Rinkes, yang diberi wewenang pemerintah kolonial untuk menata ulang Komisi Bacaan Rakyat. Ia berhasil mengembangkan komisi itu menjadi sebuah lembaga otonom. *Kantoor voor de Volkslectuur*, secara khusus mengatur pengumpulan naskah, pencetakan, penerbitan, dan peredaran buku-buku yang dianggap pemerintah bermutu. Pada 1917 lembaga ini mulai dikenal sebagai Balai Pustaka (Yusuf, 2010, 40).

Balai Pustaka sebagai lembaga resmi pemerintah kolonial mendukung secara aktif kebijakan pemerintah kolonial. Bentuk dukungan Balai Pustaka adalah dengan cara menyensor persebaran naskah di Hindia Belanda dan memproduksi serta menyebarkan bahan bacaan versi Balai Pustaka kepada masyarakat Hindia Belanda. Bacaan tersebut memuat pesan khusus untuk stabilitas



politik kolonial. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aturan atau tujuan serta produk yang dihasilkan oleh Balai Pustaka lebih mengunggulkan moral Belanda dan mencegah masyarakat untuk berpikir kritis terhadap penjajahan yang mereka alami melalui sensor ketat. Selain itu, Rinkes memiliki ambisi politik tersendiri selama memimpin Balai Pustaka (Putri, 2021).

Gambar 3.6 Petinggi Balai Pustaka pada 1920. (Koleksi KITLV, No. 4782)

Misi politis Rinkes sebagai pemimpin duwujudkan dengan peraturan berupa *Nota Rinkes*. *Nota Rinkes* berisi peraturan tentang penerimaan naskah oleh Balai Pustaka yang terdiri atas: (1) karangan tidak boleh mengandung unsur politik; (2) karangan harus dapat memberikan pendidikan budi pekerti dan membawa kecerdasan; (3) karangan harus netral terhadap agama (Mahayana, 2010, 77). *Nota Rinkes* tersebut digunakan untuk membatasi ide dan gagasan para pengarang. Tujuan pembatasan tersebut adalah untuk standardisasi tentang hal-hal yang bersifat kritis terhadap perpolitikan, isu agama, dan penindasan-penindasan kolonial. Oleh karena itu, para pengarang yang gagal menegosiasikan karyanya dan memiliki jiwa nasionalisme lebih memilih memihak penerbit lain.

Selain berfungsi sebagai lembaga sensor, Balai Pustaka juga memiliki cita-cita memajukan moral Bumiputera sesuai standar Belanda untuk menjaga stabilitas sosial politik. Hal ini merupakan strategi politik yang digunakan untuk meredam perlawanan kaum pergerakan. Oleh karena itu, lembaga ini sangat memperhatikan isi serta bahasa yang digunakan. Kebijakan sensor yang diterapkan oleh Balai Pustaka pernah dialami Takdir Alisjahbana. Takdir Alisjahbana menyatakan bahwa sebagai pengarang dengan sedih ia menerima banyak perubahan yang banyak dilakukan terhadap karangannya. Karena itu, Takdir Alisjahbana bersama beberapa rekannya sesama pengarang

menggalang kekuatan untuk menentang kediktatoran dalam bidang bahasa oleh pihak-pihak yang berkuasa di Balai Pustaka (Harahab, 1997, 28). Hal ini juga diungkapkan Takdir Alisjahbana dalam transkrip wawancara, pada buku Kenangan Pada Balai Pustaka. Takdir Alisjahbana menyatakan bahwa terdapat ketidakpuasan terhadap Balai Pustaka, dan menginginkan kebebasan, sehingga pada 1933 bangkitlah "Pujangga Baru" yang mengumpulkan lagi para intelektual Indonesia. Kebangkitan "Pujangga Baru" didukung oleh kondisi politik termasuk kebuntuan intelektual karena pembuangan Sukarno ke Ende (Balai Pustaka, 1992, 28). Fungsi sensor yang dijalankan oleh Balai Pustaka tidak hanya dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan, namun juga dengan fungsi editor yang dominan dalam mengedit naskah-naskah Balai Pustaka dengan tidak hanya bahasa namun juga konten-konten melalui proses pengeditan (Putri, 2021).

Kontestasi Bacaan Liar dengan Balai Pustaka

Kontestasi antara bacaan liar dengan Balai Pustaka terjadi pada beberapa aspek yakni, ideologi, politik, dan ekonomi. Pada masa pelaksanaan program Politik Etis, terdapat beberapa kali pergantian gubernur jenderal. Meski setiap gubernur jenderal memiliki corak pemerintahan khusus, secara umum pemerintahan masih bersifat kapitalis. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang selalu ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya serta mempertahankan kekuasaan. Salah

satu kebijakan yang diterapkan pemerintah berfokus pada pers dan penerbitan, karena media tersebut dinilai dapat menyebarkan ideologi yang membahayakan stabilitas kolonial.

Balai Pustaka sebagai lembaga penerbitan pemerintah juga memiliki fungsi kontrol terhadap persebaran ideologi di Hindia Belanda. Oleh karena itu Rinkes sebagai pemimpin Balai Pustaka menerapkan aturan yang dikenal sebagai Nota Rinkes, yang salah satunya berisi aturan tentang naskah yang diterima tidak boleh mengandung ideologi agama tertentu (Mahayana, 2010, 77). Dengan demikian naskah-naskah yang dihasilkan oleh Balai Pustaka telah melewati sensor ketat sesuai dengan Nota Rinkes mewakili kepentingan dan ideologi Pemerintah Kolonial Belanda yang bersifat kapitalis. Narasi-narasi Balai Pustaka lebih banyak berisi tentang romantisme barat atau menceritakan tentang permasalahan adat (Faruk, 2002). Balai Pustaka sendiri hadir sebagai respons atas perkembangan bacaan liar.

Bacaan liar mayoritas ditulis oleh golongan sosialis dan komunis lebih banyak menceritakan tentang perjuangan dan perlawanan terhadap ketidakadilan, sehingga dapat memicu perlawanan terhadap penjajah. Kehadiran bacaan tersebut, khususnya yang ditulis oleh kaum bumiputera, tidak terlepas dari perkembangan ideologi sosialis dan komunis di Hindia Belanda. Perkembangan sosialisme di Hindia Belanda ditandai dengan perkembangan organisasi yang berhaluan sosialis seperti Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). ISDV didirikan pada 1914, dua tahun kemudian organisasi tersebut

berkembang pesat dan memengaruhi rakyat khususnya kaum buruh. Ideologi pada organisasi tersebut juga berpengaruh terhadap Sarekat Dandang Islam (SDI) yang selanjutnya berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Di lain sisi, banyak tokoh-tokoh pergerakan seperti Tan Malaka, Semaoen, Darsono, dan Alimin Prawirodirjo. Selain itu juga muncul tokoh-tokoh baru yang bergabung dalam organisasi SI (Hasan, 2014, 6). Selain aktif berpolitik, SI juga aktif menyurakan ide dan gagasan melalui media tulisan, sehingga muncul media cetak dan penerbitan yang menerbitkan hasil karya mereka termasuk karya sastra yang digolongkan dalam bacaan liar.

Salah satu tokoh penulis bacaan liar yang terpengaruh oleh ideologi sosialis dan komunis adalah Semaoen. Pada 1915, Semaoen bertemu dengan Sneevliet dan H.W. Deeker, ia juga semakin aktif dalam rapat VSTP (Yuliati, 1994, 46). Pertemuan tersebut memengaruhi pemahaman ideologi Semaoen sehingga membuatnya lebih revolusioner. Salah satu karya Semaoen yang masuk dalam bacaan liar adalah Hikayat Kadiroen. Novel tersebut bercerita tentang seorang priayi muda bernama Kadiroen. Sebagai priayi muda pada awal abad ke-20, ia memiliki sifat dan sikap yang sangat berbeda dengan priayi pada umumnya. Kadiroen digambarkan sebagai orang yang baik, cerdas, dan membela kepentingan rakyat kecil. Selama menjabat sebagai polisi, Kadiroen juga berhasil mengungkap kebohongan yang dilakukan oleh seorang asisten wedono (Semaoen, 2018).

Dalam perjalanan karier politiknya, Kadiroen terpengaruh

ideologi komunis yang sedang berkembang dan aktif melakukan propaganda di berbagai media. Pengaruh itu mulai muncul setelah Kadiroen menghadiri vergadering Partai Komunis, dan masih mempertahankan jabatannya. Akhirnya secara diam-diam ia memberikan sumbangan dana dan mengirimkan tulisan yang diterbitkan oleh Sinar Ra'jat dengan nama pena Pentjari. Salah satu tulisan yang dikirimkan oleh Kadiroen terjerat persdelict. Tulisan tersebut berisi tentang permintaan Kadiroen agar pemerintah mengadakan saluran air dan sebagainya untuk kepentingan petani. Pada bagian akhir tulisan terdapat kalimat "Kita mohon pertolongan Goepermen, dan kalaoe kita mendapat pertolongan itoe, maka tentoelah kita rakjat akan hidup selamat. Kalimat tersebut diterjemahkan Tuan Assisten Residen bahwa jika Goepermen tidak menuruti, maka rakyat tidak selamat. Kalimat tersebut dinilai menjadi sebuah ancaman terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena itu, ia mempertanggungjawabkan tulisannya dan memilih melepas jabatan untuk bergabung dengan Partai Komunis (Semaoen, 2018).

Sepanjang perjalanan hidupnya Kadiroen juga bertemu dengan Ardinah dan ia merasa jatuh cinta kepada Ardinah. Begitupun Ardinah juga memiliki rasa kepada Kadiroen. Ardinah pada saat itu merupakan istri dari lurah desa Meloko. Namun ia merasa tertipu oleh suaminya karena ia dijadikan istri kedua dan istri pertama lurah tersebut merasa sakit hati. Selain itu, ia juga disiksa oleh suaminya yang memiliki sikap buruk terhadap rakyat yaikni memeras dan

menindas rakyat, sehingga rakyat menjadi semakin miskin. Akhirnya, Ardinah melakukan perlawanan terhadap suaminya dengan cara mengadukan kejahatan suaminya kepada Tuan Asisten Wedono. Akhirnya Kadiroen dan Ardinah dipertemukan oleh Sariman (petinggi Partai Komunis sekaligus guru dari Kadiroen) dan menjadi pasangan suami istri yang membela kepentingan rakyat (Semaoen, 2018).

Novel ini mencerminkan adanya pertarungan ideologis pada level dunia antara sosialis komunis melawan kapitalis yang terjadi pada awal abad ke-20. Semaoen sebagai ketua VSTP sangat menonjolkan realitas sosial yang bersifat realisme sosialis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa novel ini sarat akan propaganda sosialis komunis, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda yang bersifat kapitalis sangat menentang beredarnya novel yang dinilai sebagai bacaan liar tersebut. Dilihat dari narasi-narasi yang dituangkan dalam bacaan liar, penulis tidak hanya memiliki kesadaran politik, namun juga telah mulai memiliki kesadaran budaya. Penulis bacaan liar sering kali menggambarkan masyarakat Bumiputera sebagai masyarakat berkebudayaan luhur dan bermoral tinggi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial merasa khawatir jika hegemoni kebudayaan yang selama ini dibangun akan melemah. Untuk mengkonter narasi-narasi yang ada dalam novel ini, pemerintah kolonial melalui Balai Pustaka menerbitkan bacaan yang menonjolkan citra baik pemerintah kolonial.

Selain kontestasi dalam aspek ideologi, kontestasi antara sastra bacaan liar dan terbitan Balai Pustaka

juga terjadi dalam aspek politik. Atas perkembangan bacaan liar, Balai Pustaka melakukan sensor yang ketat terhadap naskah yang masuk untuk memastikan naskah diterbitkan sesuai dengan standar dan kepentingan pemerintah termasuk sebagai media legitimasi dan pencitraan Pemerintah Kolonial Belanda. Sebagai contoh dalam naskah *Merak Kena Jebak* karya Asmawinangoen, tokoh Barat yang bernama De Haan dicitrakan sebagai laki-laki baik, pekerja keras, dan pemaaf, sedangkan tokoh Harja seorang laki-laki bumiputera diceritakan sebagai tokoh yang jahat (Asmawinangoen, 1930). Begitupula dengan tokoh Datuk Maringgih yang dijadikan sebagai tokoh antagonis dalam cerita *Sitti Nurbaya* (Rusli, 2011). Di lain sisi, Rinkes sebagai pimpinan Balai Pustaka semakin aktif mencari beberapa anggota Sarekat Islam (SI) yang akan diberi nasihat atau diperkarakan. Selain itu Rinkes juga mencari kaum terdidik yang mulai mengalami kesadaran politik (Panji Poestaka, 15 Maret 1927). Tindakan tersebut dilakukan karena kaum pergerakan SI dinilai terlalu frontal dalam menyerang pemerintahan. Oleh sebab itu, banyak kaum pergerakan terjat dalam delik pers dan beberapa kali diberitakan dalam surat kabar *Pantjaran Warta*.

Beberapa kasus delik pers yang menjerat kaum bumiputera tidak menyurutkan perkembangan bacaan liar, justru perkembangan bacaan liar semakin melejit terutama pada 1920an. Salah satu yang aktif menulis sastra perlawanan adalah Marco Kartodikromo. Marco Kartodikromo merupakan murid dari Tirto Ahdhi Soerjo pemilik surat kabar Medan Prijaji. Marco Kartodikromo kemudian

terkenal sebagai seorang jurnalis yang memiliki sifat revolusioner yang pernah berkerja di berbagai surat kabar seperti Doenia Bergerak, Pantjara Warta, dan Sinar Djawa. Salah satu karya Marco Kartodikromo yang berisi ide gagasan tentang kemerdekaan dan kebebasan dari belenggu penjajah adalah syair Sama Rata dan Sama Rasa yang dimuat dalam Sinar Djawa, 10 April 1918. Syair tersebut juga dikategorikan sebagai bacaan liar karena berisi ulasan tentang penderitaan yang dialami Bumiputera dan seruan untuk memperoleh keadilan atau sama rata. Di bawah ini disajikan kutipan dari syair tersebut.

*Soepaja djalannja SAMA RATA,
Jang berdjalan poen SAMA me
RASA,
Enak dan senang bersama-sama,
Ja'toe: "Sama rasa, sama rata."
(Marco Kartodikromo, 2018)
[Supaya jalannya SAMA RATA,
Yang berjalan pun SAMA me RASA
Enak dan senang bersama-sama,
Yaitu: "Sama rasa, sama rata."]*

Pada saat dipenjara akibat delik pers sekitar 1918 karena syair *Sama Rata dan Sama Rasa*, Marco Kartodikromo menulis sebuah novel berjudul *Student Hidjo* (Marco Kartodikromo, 2008). Novel ini menceritakan tentang *Hidjo* seorang intelektual Bumiputera. Selain berkisah tentang percintaan yang dialami oleh *Hidjo*, novel ini juga bercerita tentang keberpihakan terhadap kaum Bumiputera. Beberapa contoh karya lain yang ditulis oleh Marco Kartodikromo adalah, *Mata Gelap*, *Matahariah*, *Syair Rempah-Rempah*, *Rasa Merdeka: Hikayat Soejanmo* dan lainnya (Challanan,

2016, 11-12). Akibat dari karya-karya yang dihasilkan tersebut, ia mengalami beberapa kali kasus delik pers dan pada akhirnya meninggal pada usia 43 tahun di Boven Digoel akibat terserang penyakit malaria (Adam, 1997, 2-3).

Usaha politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengkonter narasi-narasi bacaan liar salah satunya melalui lembaga penerbitan Balai Pustaka. Selain menerapkan Nota Rinke, Balai Pustaka memainkan peran penting untuk mengkonter narasi-narasi Bacaan Liar dengan cara menghadirkan bacaan baru melalui proses sensor. Sedangkan bacaan liar yang bersifat menentang kekuasaan pemerintah kolonial terus bermunculan dan membentuk kesadaran pembaca akan penjajahan yang mereka alami. Selain Rinke, Drewes juga melakukan diskriminasi untuk kepentingan politik pemerintah. Pada masa kepemimpinannya Drewes berusaha mendorong marginalisasi terhadap naskah-naskah yang terbit di luar Balai Pustaka. Hal ini dibuktikan dengan adanya artikel yang diterbitkan pada majalah *De Gids* pada 1932 tentang perkembangan kontemporer sastra.

Akan terasa sulit untuk meremehkan peran penting pemerintah dalam memegang kendali atas perkembangan selera sastra yang baik dalam masa transisi ini. Ada sebuah bahaya yang jelas bagi mereka yang mencari sesuatu yang mereka harapkan dengan sangat, namun berakhir pada hasil bahan bacaan yang buruk dengan kualitas meragukan. Penerbit yang kurang teliti berhasil memanfaatkan kecenderungan realisme ini (karena menginginkan istilah yang

lebih baik) dan dengan produk murah yang dihasilkan oleh Volkslectuur telah mampu memberikan pengaruh yang menguntungkan. Hal tersebut telah berhasil mendorong mundur literatur yang mahal (literatur sampah) yang dijual oleh penerbit Cina (Maier, 79).

Dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa Drewes mulai menunjukkan bahwa otoritas Balai Pustaka dalam mendominasi literatur di Hindia Belanda sudah cukup berhasil. Ia juga mulai mendeskreditkan peran orang Cina dalam perkembangan literatur di Hindia Belanda secara umum. Secara tidak langsung Drewes menyebutkan bahwa sastra Tionghoa ini memiliki isi yang tidak bermoral menurut standar Belanda, sensual, dan berbahaya. Hal ini karena naskah-naskah yang diceritakan oleh sastra Tionghoa lebih banyak menunjukkan identitas mereka di Hindia Belanda.

Kontrol ketat yang dilakukan oleh Balai Pustaka mendorong pendirian penerbitan swasta seperti Tjahaja Timoer. Secara sepihak pemerintah Belanda menyebut penerbitan swasta itu sebagai "saudagar kitab yang kurang suci hatinya", "penerbit tak bertanggung jawab", "agitator", dan karya-karyanya sebagai "bacaan liar" (Mingguan Pelita, 8 September 1991, 12). Bacaan liar dapat dimaksudkan sebagai bacaan yang memiliki bahasa tidak sesuai dengan standar Balai Pustaka, bersifat cabul, atau pun menentang pemerintah, bacaan yang menentang pemerintah ini pada umumnya lebih bersifat realisme sosialis. Bacaan liar yang beredar terkena sensor yang diterapkan oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka juga tidak

menerima karya-karya yang bersifat keagamaan dan tidak menerima buku agama termasuk cerita-cerita cabul. Akan tetapi yang paling penting disebutkan oleh Eka Kurniawan dalam bukunya bahwa penolakan Balai Pustaka untuk menerbitkan sastra-sastra perlawanan yang berpandangan politik berbeda dengan kebijakan pemerintah kolonial. Dari sini dapat disimpulkan bahwa karya-karya sastra realisme sosialis memiliki kecenderungan menolak sistem kolonialisme pemerintah yang tidak akan muncul melalui penerbitan Balai Pustaka (Kurniawan, 2006, 101).

Apek terakhir dalam kontestasi terjadi dalam ranah ekonomi. Dengan semakin maraknya perkembangan penerbitan di Hindia Belanda, maka Balai Pustaka juga memainkan peran sebagai lembaga monopoli. Bacaan yang diterbitkan sudah disesuaikan dengan tujuan pemerintah kolonial dipersebarakan dengan harga yang relatif murah. Harga buku yang diproduksi oleh Balai Pustaka memiliki harga yang variatif mulai dari f 0,15 hingga f 7.50 (Balai Pustaka, 1929, 2-3). Harga buku-buku Balai Pustaka cenderung dapat ditekan semurah mungkin karena subsidi pemerintah Hindia-Belanda sebesar 100.000 sampai 400.000 gulden setiap tahun. Harga murah yang ditetapkan Balai Pustaka tidak terlepas dari alat percetakan yang dimiliki sendiri pada 1921 dan pembelian kertas yang dilakukan secara besar-besaran (Swantoro, 2002, p. 61). Kebijakan tersebut menyebabkan adanya kemudahan yang diperoleh masyarakat dalam mengakses buku yang diproduksi oleh Balai Pustaka. Selain itu persebaran buku-buku Balai Pustaka juga banyak dilakukan melalui

perpustakaan sekolah dan perpustakaan keliling.

SIMPULAN

Kontestasi antara sastra bacaan liar dengan terbitan Balai Pustaka terjadi dalam tiga aspek yakni ideologi, politik, dan ekonomi. Secara ideologis bacaan liar mayoritas dihasilkan oleh penulis yang memiliki ideologi sosialis dan komunis meliputi kaum sosialis Belanda, sosialis komunis Bumiputera, dan peranakan Tionghoa. Sedangkan sastra Balai Pustaka mengalami kontrol ketat oleh Balai Pustaka sebagai tangan panjang Pemerintah Kolonial Belanda yang bersifat kapitalis. Kepentingan politis bacaan liar adalah untuk memperoleh kemerdekaan dan terbebas dari penjajahan dengan ide dan gagasan tentang kebebasan, kemerdekaan, nasionalisme, dan lain-lain. Narasi-narasi tersebut banyak dikonter oleh Balai Pustaka dengan narasi yang menunjukkan citra baik pemerintah kolonial atau orang-orang Barat, melalui proses sensor yang ketat. Secara politis tindakan yang dilakukan oleh Balai Pustaka bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda. Secara ekonomis perkembangan Bacaan Liar mulai mengalami penurunan dengan hadirnya Balai Pustaka. Hal tersebut karena Balai Pustaka memiliki fungsi monopoli dan subsidi besar yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, lembaga ini juga semakin diuntungkan dengan adanya marjinalisasi terhadap bacaan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Ahmad. 1997. "Mas Marco Kartodikromo dalam Perjuangan

Sama Rata dan Sama Rasa." *Jurnal Kinabalu* 3, 1-34. (<https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/ejk/article/download/366/274> (14 Oktober 2020)).

Asmawinangun, Mw. 1930. *Merak Kena Jebak*. Balai Poestaka: Weltevreden.

Balai Pustaka. 1929. *Boekoe-Boekoe Bahasa Melajoe dan Lain-Lain*. Batavia: Balai Poestaka.

Balai Pustaka. 1992. *Bunga Rampai Kenangan Pada Balai Pustaka*. Balai Pustaka: Jakarta.

Challanan, Shwan. 2006. "Mas Marco: Mata Gelap Crossing Language." *Shouteast Asian Studies* <https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/149094/013850122.pdf?sequence=1> (14 Oktober 2020).

Faruk, HT. 2002. *Novel-Novel Indonesia Tradisi Balai Poestaka 1920-1942*. Yogyakarta: Gama Media.

Groeneboer, Kees "Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda." *Jurnal Wacana*, I, 1999 <http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi/article/view/279> (20 Januari 2020).

Habib F, Miftahul. (2017). "Pers dan Bangkitnya Kesadaran Nasional Indonesia pada Awal Abad XX." *Istoria* Vol 12(2) Maret 2017. <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria/article/view/17613> (11 Januari 2021).

Harahab, Arselan. et. al. 1977. *80 Tahun Balai Pustaka Menjelajah Nusantara*. Jakarta: PT. Balai Pustaka Persero.

Hasan, Yunandi. 2014. "Indische Sosial Democratische

- Vereninging (ISDV) Merupakan Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia (PKI)." *Jurnal Crikestra: Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*, 3(5). <https://repository.unsri.ac.id/25160/> (11 Juli 2021).
- Herniti, Ening. 2017. "Islam dan Perkembangan Bahasa Melayu. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1) 81-96. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/516> (11 Juni 2021).
- Jedamski, Doris. 1997. "De Taalpolitiek van Balai Pustaka" *Koloniale taal politiek Oosten West: Nederlads-Indie, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba*, 159-85, (<https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16460/Doris+Jedamski++De+Taalpolitiek+van+de+Balai+Poestaka.pdf?sequence=2> (20 Januari 2020).
- Kan Sr, Koe Blaij. 1917. "Onderwijs." *Pantjaran Warta*, 9 Juni.
- Kartodikromo, Mas Marco. 1918. "Sama Rata dan Sama Rasa." *Sinar Djawa*. 10 April.
- Kartodikromo, Mas Marco. 2018. *Student Hidjo*. Yogyakarta: Narasi.
- Kurniawan, Eka. 2006. *Pramoedya Ananta Toer dan Sastra Realisme Sosialis Jakarta*: PT. Gramedia.
- Liji, Liang. 1987. "Sastra Peranakan Tionghoa dan Kehadirannya dalam Sastra Sunda" *Anne*. (https://www.persee.fr/doc/arc_h00448613_1987_num_4_1_2397 (15 Desember 2020).
- Mahayana, Maman S. 1991. "Balai Pustaka sebagai Lembaga Kebudayaan", *Mingguan Pelita*. 8 September.
- Mahayana, Maman S. 2010. "Perempuan dan Agama dalam Novel Indonesia." *Jurnal Studi Gender & Anak* 5(1) <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/247/2> (01 Juni 2020).
- Moriyama, Mikihiro. 2005. *Semang at Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesastraan Sunda Abad ke-19*. Jakarta: KPG.
- Multatuli. 2015. *Max Havelaar*. Yogyakarta: Narasi.
- Nugroho, Anung dan Danang Try Purnomo. 2007. "Citra Perempuan dalam Karya Sastra Peranakan Tionghoa" *Buana Gender*, 2(2). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/buanagender/article/download/1098/419> (15 Desember 2020).
- Panji Poestaka. 1936. "Bahasa Melajoe di Tanah Jawa." 7 Februari.
- Pantjaran Warta. 1917. "Onderwijs". 9 Juni.
- Putri, Sulistya. 2021. "The Policies of Balai Pustaka as the Dutch Colonial Government's Publishing Agency in 1917-1942." *Indonesian Historical Studies*, 5(1) 9-22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ihis/article/view/10451> (10 Juli 2021).
- Rusli, Marah. 2011. *Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Semaoen. 2018. *Hikayat Kadiroen*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.
- Sulton, Agus. 2015. "Sastra "Bacaan Liar" Harapan Menuju Kemerdekaan." *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 15(2). (<https://ejournal.upi.edu/index.php/BSJPBSP/article/view/1242> pada 22 Maret 2020 (23 Maret

- 2020).
- Suwondo, Tirto et.al. 1997. Karya Sastra di Luar Penerbitan Balai Pustaka. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Swantoro, P. 2002. Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu. Gramedia: Jakarta
- Yuliati, Dewi. 1994. "Semaoen, Serikat Buruh dan Pers Bumiputera Dalai Pergerakan Kemerdekaan (1914-1923)", *Jurnal Sejarah*, 5, <https://jurnal.masyarakatsejarawan.or.id> (24 September 2020).
- Yusuf, Iwan Awaludin, et. al. 2010. *Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*. Yogyakarta: Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).